

GLOBAL INSIGHT JOURNAL

Jurnal Mahasiswa Program Studi
Ilmu Hubungan Internasional - FISIP - UNJANI

<https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/GIJ>

DOI : <https://doi.org/10.36859/gij.v2i1.2618>



Vol. 02 No. 01 Tahun 2025

Article Informations

Corresponding Email:

mustikara976@gmail.com

Received: 20/08/2024; Accepted:
27/02/2025; Published: 27/02/2025

DAMPAK KEBIJAKAN DIVESTASI SAHAM PT. FREEPORT INDONESIA TERHADAP HUBUNGAN DIPLOMATIK INDONESIA- AMERIKA SERIKAT

Mustika Rahayu Arisma¹⁾, Iing Nurdin²⁾, M. Fauzan Alamari³⁾

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan saham PT. Freeport Indonesia terhadap hubungan diplomatik Indonesia-Amerika Serikat pada periode 2018-2021. Kebijakan ini dinilai strategis oleh Indonesia dalam upaya meningkatkan kemandirian ekonomi, namun bagi Amerika Serikat, melalui Freeport McMoRan, membuat kekhawatiran akan keamanan investasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan dari berbagai sumber yang relevan. Meskipun terdapat potensi ketegangan yang dapat mempengaruhi hubungan kedua negara, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak berdampak pada hubungan diplomatik Indonesia-Amerika Serikat. Kebijakan divestasi saham PT. Freeport Indonesia dinilai sebagai *win-win solution*, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan hubungan diplomatik kedua negara tetap stabil.

Kata kunci: Kebijakan divestasi saham, Indonesia, Freeport McMoRan, Amerika Serikat, PT. Freeport Indonesia

Abstract

This study aims to analyze the impact of PT. Freeport Indonesia's divestment policy on Indonesia-United States diplomatic relations in the 2018-2021 period. This policy is considered strategic by Indonesia in an effort to increase economic independence, but for the United States, through Freeport McMoRan, it creates concern about the security of its investment. This research uses a qualitative approach with descriptive analysis. The data collection technique used is a literature study of various relevant sources. Although there is potential tensions that could affect the relationship between the two countries, the results show that the policy has no impact on Indonesia-United States diplomatic

relations. The divestment policy of PT. Freeport Indonesia's shares is considered a win-win solution so that no party is harmed and the diplomatic relations between the two countries remain stable.

Keywords: Share divestment policy, Indonesia, Freeport McMoRan, United States, PT. Freeport Indonesia.

PENDAHULUAN

Pasca terpilihnya Presiden Soeharto sebagai pengganti Presiden Soekarno, arah kebijakan Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Presiden Soeharto menjalankan kebijakan yang lebih terbuka, ditandai dengan dibuka berbagai kerja sama dengan negara lain. Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing menjadi salah satu kebijakan yang ditujukan untuk menarik investor asing ke Indonesia. PT. Freeport Indonesia menjadi salah satu perusahaan multinasional dengan induk perusahaan Freeport McMoRan yang berbasis di Amerika Serikat. PT. Freeport Indonesia memulai operasinya di sektor pertambangan di Papua yang berlandaskan pada sistem kontrak karya yang ditandatangani pada tahun 1967. Dalam kontrak tersebut telah diatur bahwa jangka waktu operasional berlangsung selama 30 tahun dengan hak perpanjangan, saham mayoritas dimiliki oleh Freeport McMoRan sebesar 90,64%, dan pemerintah Indonesia memiliki saham 9,36% (Gustidha, 2018).

Masa operasional PT. Freeport Indonesia diperpanjang pada tahun 1991 melalui Kontrak Karya 2, yang memberikan masa operasional selama 30 tahun dengan hak perpanjangan 2X10 tahun, serta kewajiban melepas sebagian sahamnya kepada pihak Indonesia (Suharyono, 2018). Pada tahun 1991, Freeport McMoRan sempat menjual sahamnya sebesar 9,36% kepada PT. Bakrie Investama. Namun, Freeport McMoRan berhasil membeli kembali saham tersebut pada tahun 2001 dan tidak pernah melepaskan sahamnya kembali sejak saat itu (Hagrina, 2019). Kewajiban divestasi saham seharusnya tetap dilakukan oleh Freeport McMoRan karena hal tersebut telah tercantum dalam Kontrak Karya 2.

Pada tahun 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggantikan Undang-Undang No.1 Tahun 1967 dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang bertujuan untuk lebih menguntungkan Indonesia. Namun, penerapan kebijakan ini menghadapi hambatan sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan No. 23 Tahun 2010 yang kemudian direvisi dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012. Dalam peraturan tersebut memuat mengenai kewajiban divestasi saham, perubahan sistem kontrak, dan penguatan peran pemerintah. Peraturan ini kerap mendapatkan respons negatif dari para investor asing.

mengeluarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1967. Presiden Bambang Yudhoyono menilai bahwasanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing lebih menguntungkan pihak asing dan merugikan Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah Indonesia mendapatkan berbagai hambatan sehingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian direvisi kembali dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012. Dalam peraturan tersebut memuat mengenai kewajiban divestasi saham, perubahan sistem kontrak, pelarangan ekspor bahan mentah, dan penguatan peran pemerintah.

Freeport McMoRan menjadi salah satu yang paling menentang kebijakan ini, dengan mengancam akan menghentikan produksi, melakukan PHK masal hingga akan menggugat pemerintah Indonesia ke arbitrase internasional (Renatha, 2017). Ancaman tersebut berhasil memukul mundur pemerintah Indonesia dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, meski hasilnya tetap tidak memuaskan.

Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia berupaya untuk kembali mengambil kendali atas aset vital, termasuk sektor pertambangan. Hal tersebut menjadi kepentingan nasional yang harus dicapai. Namun, untuk mencapainya, Presiden Jokowi tetap memperhatikan dampaknya terhadap hubungan diplomatik dengan negara asal investor. Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Mineral. Meskipun demikian, kebijakan ini tetap ditentang oleh sehingga mengakibatkan terjadinya pemberhentian puluhan ribu pekerja dan kemunduran ekonomi di sekitar wilayah operasi (Krithika, 2017). Setelah berbagai negosiasi dilakukan, pada 12 Juli 2018, pemerintah Indonesia dan Freeport McMoRan menyepakati *Head of Agreement* (Itjen Menlhk, 2018). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak divestasi saham PT. Freeport Indonesia terhadap hubungan diplomatik Indonesia-Amerika Serikat selama periode 2018-2021, khususnya dalam sektor ekonomi dan politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dari John W. Cresswell, untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari isu-isu sosial atau kemanusiaan (John W. Cresswell, 2016). Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yang berfokus pada pemahaman permasalahan dalam masyarakat serta proses dan dampak dari suatu peristiwa (M. Iqbal, 2002). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengelola sumber data yang diperlukan untuk menganalisis dampak kebijakan divestasi saham PT. Freeport Indonesia terhadap hubungan diplomatik Indonesia-Amerika Serikat pada periode 2018-2021. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang berasal dari buku, artikel jurnal, koran, dan dokumentasi terkait lainnya.

PEMBAHASAN

Kehadiran awal PT. Freeport Indonesia sangat berarti bagi Indonesia yang pada saat itu sedang mengalami krisis ekonomi. Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dirancang untuk menarik investor asing agar dapat mendorong perekonomian nasional. Namun, undang-undang ini justru membatasi kontrol pemerintah Indonesia atas beroperasinya perusahaan multinasional yang mengeksplorasi kekayaan alam, termasuk PT. Freeport Indonesia. Akibatnya, pemerintah mengalami kesulitan dalam mengawasi aktivitas perusahaan yang terlibat dalam berbagai pelanggaran, seperti pelanggaran HAM dan pencemaran lingkungan (Walhi, 2017). Kurangnya kontrol pemerintah ini berpotensi menimbulkan friksi yang mempengaruhi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Perbedaan proporsi saham antara pemerintah Indonesia dan Freeport McMoRan menciptakan ketimpangan dalam kekuasaan dan pembagian keuntungan. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2017 yang telah diaudit, PT. Freeport Indonesia memperoleh pendapatan sekitar US\$ 4,44 miliar, dengan pemerintah Indonesia mendapatkan sekitar US\$ 756 juta, dan Freeport McMoRan meraup sekitar US\$ 3,68 miliar (Rivi, 2018). Sebagai pemilik sumber daya alam, Indonesia seharusnya memperoleh keuntungan yang lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih kuat untuk meningkatkan posisi Indonesia dalam negosiasi dengan perusahaan multinasional guna melindungi kepentingan nasional.

Mengambil kembali kekayaan alam yang selama ini dikuasai oleh pihak asing menjadi salah satu kepentingan nasional yang harus dicapai pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Namun, dalam membuat kebijakan yang menyangkut pihak asing, Presiden Jokowi tetap mempertimbangkan banyak faktor supaya tidak mengganggu hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat. setelah berbagai upaya dan negosiasi yang panjang, akhirnya Indonesia dan Freeport McMoRan menyepakati *Head of Agreement* pada tahun 2018, antara lain mencakup divestasi saham 51% dimiliki oleh Indonesia, pembangunan

smelter selama 5 tahun di dalam negeri, stabilitas penerimaan negara lebih besar dari pada melalui kontrak karya, dan perpanjangan produksi 2X10 tahun (Itjen KLHK RI, 2018). Kebijakan divestasi saham PT. Freeport Indonesia turut memainkan peran dalam dinamika hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika Serikat.

1) Dinamika Hubungan Indonesia-Amerika Serikat dalam Sektor Ekonomi Pasca Kebijakan Divestasi Saham PT. Freeport Indonesia

Sektor ekonomi telah menjadikan Indonesia dan Amerika Serikat sebagai mitra yang saling melengkapi dengan berbasis pada kepentingan bersama. PT. Freeport Indonesia menjadi salah satu contoh kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan multinasional asal Amerika Serikat. Meskipun investasi ini tidak melibatkan langsung kedua pemerintah, PT. Freeport Indonesia yang terdaftar dalam bursa saham Amerika Serikat, diawasi langsung oleh pemerintah Amerika Serikat melalui *United States Securities and Exchange Commission* maupun *Foreign Corrupt Practices Act* (Ginandjar, 2018). Dengan demikian, keberlangsungan operasional PT. Freeport Indonesia melibatkan pengawasan dari Amerika Serikat.

Selama periode 2018-2021, hubungan ekonomi Indonesia-Amerika Serikat mengalami fluktuatif. Berdasarkan laporan Kementerian Perdagangan Indonesia, nilai investasi langsung Amerika Serikat menurun dari tahun 2018 hingga tahun 2020, namun kembali meningkat pada tahun 2021. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh pandemi Covid-19, yang mengganggu perdagangan global, rantai pasokan, dan investasi, yang memaksa negara-negara harus beradaptasi untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian.

Tabel 1.1 Nilai Investasi Langsung Amerika Serikat di Indonesia

Tahun 2018-2021

No.	Tahun	Nilai Investasi (US\$)
-----	-------	------------------------

1	2018	1.217.623.500
2	2019	989.312.700
3	2020	749.730.900
4	2021	2.537.218.500

Nilai investasi langsung Amerika Serikat di Indonesia mengalami penurunan juga dikarenakan kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang melakukan stimulus moneter melalui bank sentral Amerika Serikat. Kebijakan ini bertujuan untuk menarik kembali para investor dalam negeri maupun investor asing untuk menanamkan modalnya di Amerika Serikat. Kebijakan berhasil memperkuat ekonomi Amerika Serikat, tetapi menambah tekanan bagi negara berkembang yang bergantung pada investasi asing, terutama dari Amerika Serikat (Syahrizal, 2019).

Selain penurunan nilai investasi, hubungan ekonomi Indonesia-Amerika Serikat juga memburuk terkait *Generalized System of Preferences* (GSP). Pemberhentian pemberian GSP ini berlangsung dari tahun 2018-2020, disebabkan oleh penilaian *United States Trade Representative* (USTR) menemukan indikasi kebijakan perdagangan dan investasi Indonesia merugikan Amerika Serikat, yang berdampak pada defisit neraca perdagangan Amerika Serikat terhadap Indonesia (Syahrizal, 2019).

Tabel 1.2 Neraca Perdagangan Indonesia-Amerika Serikat Tahun 2018-2021

Tahun	Nilai Dalam Juta USD	
	Ekspor	Impor
2018	18,439.8	10,176.2
2019	17,844.6	9,261.6
2020	18,622.5	7,580.2
2021	25,793.0	11,249.2

Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 menunjukkan bahwa tahun 2021 terjadi kenaikan nilai investasi langsung dan neraca perdagangan. Peningkatan ini dipengaruhi oleh membaiknya kondisi perekonomian pasca pandemi Covid-19. Selain itu,

sejak Presiden Joe Biden menjabat sebagai presiden pada tahun 2021, kebijakan luar negeri Amerika Serikat lebih terbuka dengan fokus pada perdagangan internasional dan investasi, serta penekanan terhadap pentingnya Asia Pasifik, berpotensi memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Penurunan nilai investasi langsung, pemberhentian *Generalized System of Preferences* dan penurunan neraca perdagangan yang terjadi dari tahun 2018 hingga 2020 ini bukan dampak dari kebijakan divestasi saham PT. Freeport Indonesia. Kemunduran hubungan Indonesia-Amerika Serikat dalam sektor ekonomi dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kebijakan pemerintah, pandemi Covid-19, harga produk, minat konsumen, dan sebagainya.

2) Dinamika Hubungan Indonesia-Amerika Serikat dalam Sektor Ekonomi Pasca Kebijakan Divestasi Saham PT. Freeport Indonesia

Kesepakatan divestasi saham PT. Freeport Indonesia tercapai setelah negosiasi panjang yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Freeport McMoRan, John McCain, Mike Pence, dan Joseph. R. Donovan. Dalam hal ini, John McCain selaku Senator Negara bagian Arizona, melakukan penolakan dan “menuduh” kebijakan Indonesia yang mengharuskan perusahaan melakukan divestasi saham 51% merupakan bentuk nasionalisasi (Junaidi, 2017). Meskipun surat tersebut bukan berarti dari pemerintahan pusat Amerika Serikat, tetapi mempengaruhi proses renegosiasi sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun, hal tersebut tidak mempengaruhi pemerintah Indonesia untuk mundur.

Berbeda dengan Senator Negara bagian Arizona yang memberikan respons negatif, kedatangan wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence pada 20 April 2017 di Jakarta yang bertemu dengan Presiden Jokowi, sedikit membahas mengenai keberlangsungan investasi PT. Freeport Indonesia. Mike Pence merasa puas atas penjelasan Presiden Jokowi yang memperjuangkan kedaulatan ekonomi Indonesia (Ihsanuddin, 2018). Selain itu, Duta Besar

Joseph R. Donovan sebagai perwakilan resmi Amerika Serikat melakukan kunjungan pada tanggal 21-24 September 2018 di Timika dan Tembagapura, Papua, menyatakan dukungan atas keputusan Presiden Jokowi yang dinilai “*win-win solution*”. Menurut Joseph R. Donovan, keputusan yang diambil oleh Presiden Jokowi dinilai dapat memberikan kepastian bagi keberlanjutan investasi Freeport dimasa depan dan memastikan komitmen keberlanjutan investasi (U.S. Embassy Jakarta, 2018). Kedua tokoh politik dari Amerika Serikat ini menyatakan dukungan terhadap kebijakan tersebut.

Pada tahun 2019, Indonesia dan Amerika Serikat merayakan 70 tahun hubungan diplomatik (Yuni Arisandy, 2019). Hubungan kedua negara telah berkembang dan semakin kuat sejak tahun 2010 dengan penandatanganan *Comphensive Partnership Agreement*. Kerja sama ini kemudian diperkuat dengan pembentukan *Country Development Cooperation Strategi* (CDCS) 2020-2025 bersama USAID, yang berfokus pada efektivitas pemerintah, sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan hidup (USAID, 2020). Dengan demikian, hadirnya CDCS menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan diplomatik kedua negara. Hubungan diplomatik Indonesia-Amerika Serikat kembali meningkat pada tahun 2021 yaitu dengan kehadiran Antony Binken selaku menteri luar negeri Amerika Serikat yang melakukan penandatanganan dua *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri Indonesia, dan Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (U.S. Embassy Jakarta, 2021).

Berbagai kerja sama tetap dilakukan oleh Indonesia-Amerika Serikat pasca disepakatinya kebijakan divestasi saham PT. Freeport Indonesia pada tahun 2018. Meskipun pada awalnya terjadi ketegangan dalam divestasi saham PT. Freeport Indonesia, namun kesepakatan yang dicapai pada akhirnya tidak mengganggu hubungan diplomatik tetapi semakin memperkuat fondasi kemitraan Indonesia-Amerika Serikat. Dengan demikian, kesepakatan divestasi saham PT. Freeport Indonesia tidak hanya menunjukkan kedewasaan kedua

negara dalam menangani perbedaan pendapat, tetapi juga mendorong kedua negara untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang.

KESIMPULAN

Negosiasi divestasi saham PT. Freeport Indonesia menunjukkan kedewasaan dalam diplomasi antara Indonesia dan Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia berhasil mengeluarkan kebijakan yang tidak hanya menguntungkan Indonesia tetapi juga pihak lain yang terlibat. Meskipun terdapat tantangan dalam hubungan ekonomi yang terjadi tahun 2018 hingga 2020, ini disebabkan oleh pandemi global yang melanda seluruh dunia. Namun, hubungan diplomatik di sektor politik tetap solid, dengan banyaknya kerja sama yang dilakukan oleh kedua negara pasca kesepakatan divestasi saham PT. Freeport Indonesia. Kebijakan divestasi saham PT. Freeport Indonesia terbukti tidak mempengaruhi hubungan diplomatik kedua negara, melainkan memperkuat kemitraan strategis di berbagai bidang. Hal ini menunjukkan bahwa kedua negara mampu bekerja sama dengan baik meskipun menghadapi berbagai tantangan.

REFERENSI

- Azkia Hagrina, "Pengaturan Divestasi Saham Melalui Divestasi Sebagai Refleksi Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara "Dikuasai oleh Negara;,
Lex Renaissance, 4.2 (2019), 255
- Creswell, John W. Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Terj. Achmad Fawaid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016)
- Gustidha, "Riwayat Divestasi Freeport ke Indonesia," (12 Januari 2018), internet, 28 November 2023,
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20180112160028-4-1350/riwayat-divestasi-freeport-ke-indonesia>

Ihsanuddin, "Presiden Jokowi dan Wapres AS Mike Pence Bicarakan Freeport", Kompas, 20 April 2017, <https://nasional.kompas.com/read/2017/04/20/17373291/presiden.jokowi.dan.wapres.as.mike.pence.bi.carakan.freeport>

Iqbal, M, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)

ITJEN KLHK RI. "Penandatanganan Pokok-Pokok Perjanjian Divestasi Saham PT. Freeport Indonesia (PT. FREEPORT INDONESIA)," (12 Juli 2018), internet 22 November 2023 Penandatanganan Pokok-pokok Perjanjian Divestasi Saham PT Freeport Indonesia (PT. FREEPORT INDONESIA) (menlhk.go.id)

Junaidi Albab Setiawan, "Nasionalisasi Tambang Asing", (21 April 2017), internet, 20 Maret 2024, <https://www.kompas.id/baca/opini/2017/04/21/nasionalisasi-tambang-asing>

Satrianegara, Rivi. "Penerimaan RI dari Freeport 2017 Meroket 78% Jadi 10,20 T," (7 Maret 2018), internet 28 November 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180307182440-4-6542/penerimaan-ridari-freeport-2017-meroket-78-jadi-rp-1020-tpe>

Sidik, Syahrizal. "Ini Sederet Alasan kenapa Investasi 2018 Loyo", (30 Januari 2019), internet 18 Maret 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190130161424-17-53101/ini-sederet-alasan-kenapa-investasi-2018-loyo>

Suharyono, "Kilas Balik Freeport Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional", *Jurnal Ilmu dan Budaya*, 41.60 (2018)

Swasty, Renatha, "Pengamat: Dulu, Pemerintah Takut Ancaman Freeport," (26 Februari 2017), internet, 26 November 2023, Pengamat: Dulu, Pemerintah Takut Ancaman Freeport (medcom.id

U.S. Embassy Jakarta, "Dubes Donovan Berkunjung ke PT. Freeport Indonesia, Dukung Visi "Win-Win" Presiden Jokowi", Kedutaan Besar dan Konsultan AS di Indonesia, 27 September 2018, <https://id.usembassy.gov/id/dubes-donovan-berkunjung-ke-pt-freeport-indonesia-dukung-visi-win-win-presiden-jokowi/>

U.S. Embassy Jakarta, Secretary of State Antony J. Blinken's visit to Jakarta, Indonesia, 2021, Available: <https://id.usembassy.gov/secretary-of-state-antony-j-blinkens-visit-to-jakarta-indonesia/>. 143 Irwan Sapto Adhi, "Menlu AS Antony Blinken Tiba di Indonesia, Bawa Misi Besar untuk ASEAN", (13 Desember 2021), internet, 20 Maret 2024, <https://www.kompas.com/global/read/2021/12/13/162300370/menlu-as-antony-blinken-tiba-diindonesia-bawa-misi-besar-untuk-asean>

Walhi, "Keperihatinan Kelompok Masyarakat Sipil Terhadap Konflik PT. Freeport dan Pemerintah Indonesia", (23 Februari 2017), internet, 22 November 2023, <https://www.walhi.or.id/keperihatinan-kelompok-masyarakat-sipil-terhadap-konflik-pt-freeport-dan-pemerintah-indonesia>

Yuni Arisandy Sinaga, "Indonesia-Amerika Serikat peringati 70 Tahun Hubungan Diplomatik", (10 April 2019), internet, 20 Maret 2024, <https://www.antaranews.com/berita/824666/indonesia-amerika-serikat-peringati-70-tahun-hubungan-diplomatik>